DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	…..
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 12 Juni 2023
Waktu	:	Pukul 10.18 WIB s.d. 11.04 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	:	Dony Maryadi Oekon, S.T. (F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	:	Pengantar RKA-K/L Tahun Anggaran 2024
Hadir	:	26 orang anggota hadir dari 50 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:
PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua KOomisi VII DPR RI.
3. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

4 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Nasyirulah Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.

3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
4. Paramitha Widya Kusuma, S.E.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Ir. Lamhot Sinaga
5. Bambang Hermanto, S.E.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M. (F-PKB)
2. Drs. H. Anwar Idris (F-PPP)

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bisa kita mulai?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII 7 DPR RI, hadir disini Pak Eddy Soeparno.
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Perindustrian RI beserta jajaran, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat-rapat Komisi VII DPR RI pada masa persidangan V Tahun 2022-2023, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda pengantar RKAKL Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR yang telah hadir berjumlah 14 anggota dari 50 anggota yang Komisi VII, yang terdiri atas 6 fraksi dari 9 traksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu impinan meminta persetujuan anggota agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas perjuangan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.18 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)

Sebelum melanjutkan rapat ini kami minta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 11.20 WIB atau 1 jam setelah rapat ini dimulai, apakah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Atas arah dan postur kebijakan fiskal tahun 2024 adalah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam jangka pendek belanja negara akan mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

Sementara dalam jangka menengah ditunjukkan untuk deregulasi dan meningkatkan *hillirisasi* sumber daya alam, sehingga mampu menghasilkan *output, outcome* yang optimal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam RPJMN 2020-2024, sektor industri diharapkan menjadi salah satu sektor prioritas yang dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Apabila dilihat dari alokasi anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2023 yang relatif kecil, yaitu sebesar 3,2 triliun maka ekspektasi ini membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan.

Pada tahun 2024 mendatang fleksibilitas anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tidak jauh berbeda. Mengingat berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024, usulan pagu indikatif belanja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,7 triliun atau hanya meningkat sebesar 500 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2023.

Namun demikian melalui rapat kerja ini Komisi VII DPR RI mendukung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk berupaya semaksimal mungkin agar ruang fleksibilitas anggaran di tahun mendatang terus meningkat, sehingga pengembangan sektor industri sebagai sektor unggulan menjadi sebuah keniscayaaan.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Untuk efektivitas waktu kami persilakan Menteri Perindustrian untuk menyampaikan pemaparannya terkait pengantar RKAKL Tahun Anggaran 2024.

Kami persilakan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati yang kami banggakan Pimpinan Komisi VII DPR RI Bapak Dony Maryadi Oekon, Bapak Eddy Soeparno, tadi ada Bapak Sugeng Soeparwoto dan juga segenap Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir, Pak Willy, Pak Bambang, Pak Mukhtarudin, kemudian Pak Gandung, Pak Mulyanto dan Pak Sartono, Ibu Roro dan Bapak-Ibu sekalian,
Yang juga saya hormati pejabat Kementerian Perindustrian Eselon 1, Eselon 2 dan pejabat lainnya yang mendampingi saya dalam acara Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, tentang pengantar RKAKL tahun 2024.

Sebelum saya menyampaikan pemaparan saya atau laporan kepada Komisi VII, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisi VII dan kepada Anggota Komisi VII atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan juga pengantaran RKAKL Tahun Anggaran 2024.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan, Bapak-Ibu yang terhormat Anggota Komisi VII.

Sekilas saya akan menyampaikan kondisi kinerja makro sektor industri, di mana dapat kami sampaikan bahwa perjalanan pembangunan sektor industri pengolahan nonmigas pada awal tahun 2023, *alhamdulillah* cukup baik.

Sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi penopang utama bagi perekonomian nasional yang dapat kita lihat dari beberapa indikator.

1. Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan 1, 2023 tumbuh sebesar 4,67%.
2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan 1, 2023 sebesar 16,77%,
3. Nilai ekspor industri pengolahan nonmigas periode Januari-April 2023 mencapai 60,62 miliar dolar Amerika atau 70,20% dari total ekspor nasional.
4. Nilai investasi di sektor pengolahan nonmigas pada triwulan 1, 2023 mencapai 135,30 triliun atau 41,14% dari total investasi nasional, dan
5. Aspek Ketenagakerjaan, di mana industri pengolahan nonmigas mampu menyerap 19,11 juta orang pada bulan Agustus tahun 2022.

Berbagai indikator positif pun terus bisa kita lihat selaras dengan poin yang kita dapatkan dari survei IKI atau Indeks Perusahaan Industri, pada bulan Januari sampai April 2023 yang masih berada di atas angka 50 dan juga survei

PMI yang kalau saya tidak salah 16 atau 17 bulan berturut-turut angkanya di atas 50, walaupun survei terakhir ini angka yang terendah dalam satu tahun terakhir dan ini tentu harus menjadi *warning* bagi kita semua.

Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan mengenai progres pelaksanaan anggaran tahun 2023, perlu kami informasikan bahwa Kemenperin, Kemenperin memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pemerintah, berupa bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB roda dua sebesar 1,4 triliun. Sehingga anggaran Kemenperin saat ini mencapai 4,2 triliun.

Realisasi anggaran Kemenperin sampai dengan 31 Mei 2023 di luar anggaran bantuan pembelian KBLBB telah mencapai 27,34%. Namun apabila anggaran bantuan pembelian KBLBB dimasukkan ke dalam atau ditambahkan ke dalam anggaran Kemenperin, maka realisasi anggaran kementerian baru mencapai 19,06%.

Beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran Kemenperin berada di bawah rata-rata nasional, antara lain:

1. Terdapat anggaran Kementerian Perindustrian yang masih diblokir sebesar 207,57 miliar atau 4,49% dari total anggaran, dimana dari sebagian besar blokir tersebut merupakan blokir yang disebabkan kebijakan *automatic adjustment* secara nasional.
2. Beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang cukup besar, seperti pengembangan WUB, Diklat 3 in 1, pembangunan konstruksi SMK Bogor dan Politeknik Cilegon saat ini masih dalam proses pengadaan atau lelang barang dan jasa, serta dalam proses pelaksanaan. Adapun total anggaran untuk kegiatan tersebut yang dalam proses pengadaan pelaksanaan sebesar 263,45 miliar, dan
3. Terdapat anggaran bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua sebesar 1,4 triliun atau 30,29% dari total langganan Kemenperin yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam DIPA Kemenperin pada bulan April 2023.

Sebagai laporan saat ini program laporan terhadap program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua saat ini masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai salah satu dari 4 kriteria penerima bantuan yang telah mendapatkan potongan harga sebanyak 4 unit yang tersalurkan, 2 unit terverifikasi dan 696 unit dalam proses pendaftaran. Sehingga Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII masih terdapat kuota sisa sebesar 199.298 unit.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Beberapa progres kegiatan prioritas Kemenperin pada tahun 2023 dapat kami laporkan secara singkat, antara lain:

Yang pertama, kementerian terus meningkat kemampuan wirausaha baru atau WUB sektor industri kecil dan menengah, ini agak sektor IKM ini semakin tumbuh dan memiliki daya saing. Dalam upaya peningkatan populasi wirausaha baru IKM, khususnya dari calon wirausaha yang memiliki jiwa kewirausahaan ini telah dilaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha industri, melalui pelatihan, bimbingan teknis, manajemen kewirausahaan dan memberikan fasilitasi izin usaha atau legalitas usaha, serta fasilitasi mesin peralatan.

Meningkatkan produktivitasnya baik itu melalui program santri-*preuner*, penumbuhan wirausaha di daerah tertinggal, perbatasan, terluar dan pasca bencana serta penumbuhan wirausaha yang bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya. Saat ini realisasi yang dicapai sampai bulan Mei masih rendah 8.54% atau telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 241 seminar wirausaha baru IKM.

Hal kedua yang dapat kami laporkan beberapa progres kegiatan prioritas, yaitu pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Industri dan Balai Diklat Industri (BDI), mencakup latihan sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri agar terbentuk *link and match* antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja. Saat ini realisasi yang dicapai sampai dengan bulan Mei sebesar 30,07% atau telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 11.517 orang.

Program prioritas 2023 yang ketiga yang ingin laporkan adalah partisipasi Indonesia pada Hannover Masse 2023. Suatu *event* pameran teknologi industri terbesar di dunia dari tanggal 17-21 April 2023 di Hannover Jerman. Hannover Masse 2023 tidak hanya sebagai ajang promosi bagi Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan kesiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital.

Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri, maupun terjalinnya kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai *supply global* atau *global supply change*.

Dapat Kami laporkan bahwa *output* yang telah dicapai dalam forum Hannover Masse ada 30 kesepakatan kerjasama yang terdiri dari:

a. 25 kerjasama *B to B* senilai 37 triliun,
b. Kemudian ada 1 kerjasama *G to G* dan
c. 4 kerjasama *G to B.*

Yang keempat, yang ingin kami laporkan yang tadi juga sudah kami laporkan berkaitan dengan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua. Pemerintah terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem berbasis baterai di tanah air.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program bantuan pembelian *Electric Vehicle* (EV) yang basis produksinya dilakukan di dalam

negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan-kendaraan listrik.

Di sisi lain dalam hal ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berminat untuk investasi di tanah air. Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan bantuan pembelian KBLBB, KBLBB roda dua sebanyak 200.000 unit.

Yang kelima, yang ingin kami laporkan yaitu program restrukturisasi mesin atau peralatan industri tekstil sebagai upaya mengakselerasi peningkatan kinerja industri PPT di pasca pandemi Covid-19. Progres ini, progres sampai saat ini terdapat 12 perusahaan dengan nilai investasi 62,67 miliar, dengan potensi nilai bantuan yang akan dibahas dan direalisasikan pada tahun ini, tahun 2023 sebesar 3,9 miliar.

Namun demikian kami optimis bahwa secara, secara umum Pimpinan dan Anggota Komisi VII, kami optimis bahwa realisasi program dan anggaran Kementerian Perindustrian akan berjalan sebagaimana target yang telah ditetapkan dan kami proyeksikan realisasi anggaran pada Bulan Juni akan sebesar 24,15% dan realisasi anggaran pada Bulan Desember mencapai 98,39%.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S287 dan seterusnya dan Nomor B29 dan seterusnya, tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 sebesar 3,76 triliun.

Pagu tersebut bersumber dari:
1. Rupiah murni sebesar 3,4 triliun,
2. PNBP 173,8 miliar,
3. BLU 119,1 miliar,
4. SBSN 67,6 miliar.

Rincian alokasi belanja sebagai berikut, yaitu:
- Belanja pegawai sebesar 831,7 miliar,
- Belanja operasional sebesar 405,6 miliar,
- Belanja non-operasional sebesar 2,52 triliun.

Dalam pagu indikatif tersebut terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar 950,6 miliar, bila kita sandingkan anggaran Kementerian Perindustrian pada pagu indikatif 2024 yang sebesar 3,76 triliun dengan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2023 tahun ini di luar tambahan anggaran untuk bantuan pemilihan KBLBB yaitu sebesar 3,22 triliun, maka terdapat kenaikan anggaran sekitar 16%.

Untuk rincian pagu indikatif Kementerian Perindustrian tahun 2024 berdasarkan program dapat kami sampaikan, sebagai berikut:

a. Program dukungan manajemen sebesar 1,58 triliun,
b. Program nilai tambah dan daya saing industri 1,76 triliun,
c. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 418,20 miliar.

Sedangkan rincian pagu indikatif Kemenperin tahun anggaran 2024 berdasarkan unit Eselon 1 dapat kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk Sekretaris Jenderal 497,10 miliar,
2. Untuk Direktorat Jenderal Industri Agro 127,45 miliar,
3. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil 177,12 miliar,
4. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sebesar 566,72 miliar,
5. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka sebesar 491,13 miliar,
6. Sementara Inspektorat Jenderal anggaran pagu indikatifnya 50,02 miliar,
7. BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar 745,33 miliar,
8. Direktorat Jenderal KPAII Ketahanan Kewilayahan dan Akses Industri Internasional 129,21 miliar dan
9. Untuk BPSDMI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 976,85 miliar.

Beberapa kegiatan prioritas Kemenperin tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut, yaitu:

1. Program pendidikan dan pelatihan vokasi, antara lain: penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in1, program DIII dan DIV berbasis kompetensi dan juga adanya pembangunan gedung Smart Bogor SMAK Bogor.
2. Kegiatan prioritas selain Pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu: program nilai tambah dan daya saing industri. Di sini antara lain adalah sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, kemudian perbaikan rantai pasok di industri agro, adanya restru atau restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil kulit dan alas kaki, bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, kemudian ada pengembangan kawasan industri, ada program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang terhormat.

Alokasi pagu indikatif Kemenperin pada tahun 2024 memang mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2023, namun ini seperti biasa ada namunnya, Pimpinan. Mengingat pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dan periode RPJMN 2020-2024, maka diperlukan adanya upaya yang lebih untuk menyelesaikan program-program pemerintah yang sedang berjalan dan untuk menuntaskan target-target RPJMN yang belum optimal capaiannya.

Oleh sebab itu kami dari Kementerian Perindustrian berkenan, apabila Pimpinan berkenan dan segenap Anggota Komisi VII mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 1,025 triliun untuk pelaksanaan beberapa program prioritas yang tadi sudah kami sampaikan.

Yang pertama, usulan tambahan 1,025 triliun itu untuk program:

- Restru mesin peralatan IKM,
- Kemudian program penerapan *Steamless Palm Oil* Teknologi (SPOT),
- Kemudian program penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in1,
- Program Restru atau restrukturisasi mesin peralatan khusus untuk industri tekstil, kulit dan alas kaki,
- Program *monitoring* dan evaluasi perkembangan industri *smelter* logam bukan besi,
- Penyusunan kebijakan *Carbon Capture Utilization and Storage* CCUS, pengembangan *green ammonia*, *green hidrogen sector industry*, dan
- Pembentukan Kawasan Industri berwawasan lingkungan atau *eco industrial pulp*.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar terhadap RKAKL Kemenperin tahun 2024 dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII, atas dukungannya yang telah selama ini diberikan kepada Kemenperin dan kami berharap bahwa akan ada dukungan kembali untuk Kemenperin dalam anggaran tahun 2024 yang akan datang. Ini dalam rangka mendorong atau mengakselerasi pembangunan industri nasional.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon arahan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas pemaparan dan penjelasan yang telah sampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa pemaparan RKAKL yang baru saja disampaikan oleh Menteri Perindustrian tersebut sebagai pengantar saja, sedangkan detail dari RKAKL tersebut akan dibahas dalam RDP dengan masing-masing Eselon 1 Kementerian Perindustrian pada hari ini setelah Rapat

Kerja dengan Menteri Perindustrian selesai. Jadi kita nanti pendalaman nanti setelah ini, jadi ini hanya sebagai pengantar dulu, setuju ya.

Kita tayangkan dulu kesimpulannya, kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Senin 12 Juni 2023.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Pimpinan, saya izin interupsi karena inikan yang terkait 2024-nya, kan yang 2023-nya baru sedikit evaluasi.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait 2023, bukan yang ini.

KETUA RAPAT:

Yang ini *oke*, yang 2024?

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Oke, sedikit yang 2023-nya saya ingin menyampaikan beberapa hal.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Karena nanti *kan* hanya 2024 *kan* yang kita bahas di sesi berikutnya.

Baik, terima kasih Pimpinan dan Anggota sekalian.

Bapak Menteri sekalian beserta jajarannya.

Pertama-tama, mungkin saya *nggak* tahu terjadi pergantian di Eselon 1 kementerian Bapak kelihatannya Pak ya, Pak Sekjen kayaknya pindah posisi duduknya.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Bisa saya jelaskan pergantiannya Pak Pimpinan.

Jadi karena Sekjen Pak Dodi Widodo pensiun, beliau tidak hadir sehingga sekarang sambil mencari pengganti definitif saya menugaskan Pak Dirjen Agro sebagai Plt. Sekjen dan juga kami memperkenalkan Irjen yang baru Pak Muhammad Ruh ini organik dari Kejaksaan Agung, tapi sangat cepat belajar hal-hal yang berkaitan dengan industri. Pak Irjen yang lama Pak Maslahan kami tugaskan di BPSDM.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Oke, baik saya lanjutkan.

Yang pertama-tama saya lihat capaian yang di tahun 2023 ini yang ingin saya tanyakan dan mohon mendapat perhatian, yang pertama adalah kontribusi perindustrian terhadap pembangunan untuk PDB total sebesar 16,8%. Kemudian kontribusi pertumbuhan industri ya di sekitar angka 4,7%, kemudian juga kontribusi ekspor dari industri pengolahan sebesar 70%.

Angka-angka ini ya sebagian ada yang lumayan bagus menurut saya, namun ini kita harus terus dorong Pak Menteri kalau tidak ya kita akan terjadi seperti yang sekarang ini *nggak* bergerak menjadi apa istilahnya, istilahnya itu di industrialisasi diri, *nggak* meningkat terus tapi terus turun kontribusinya.

Karenanya kita berharap kita dorong terus Kementerian Perindustrian, sektor industri ini menjadi primer *mover* bagi pertumbuhan nasional tanpa itu kita *nggak* bisa ngangkat pertumbuhan kita ini, *nggak* mungkin kita mengandalkan dari sektor primer.

Oleh karenanya Pak Menteri capaian-capaian 2003 ini kami menginginkan agar Kementerian Perindustrian ini tampil di depan di dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam. Jadi isunya harus kita geser, jangan sekedar *hillirisasi* mineral, tapi industrialisasi. Sehingga betul-betul kita *involve* dari *demand*-nya kita bangun industri, sehingga betul-betul kita gerakkan ke arah apa, industri yang lebih mantap lagi.

Apalagi *kan* sudah jelas ini terhitung bulan Juni ini bauksit dilarang iya kan, barang mentahnya sekarang sudah dilarang. Kalau *nggak* ada industri hilirnya yang bisa menyerap dengan bagus, kelimpungan ini. Begitu juga timah, Pak Bambang sangat paham kalau timah *nggak* didorong industrialisasinya maka ya tidak optimal, begitu juga tembaga.

Tembaga *kan* kita tragis, akhirnya melanggar undang-undang, undang-undang melarang untuk ekspor konsentrat tembaga. Akhirnya pemerintah melanggar itu diberikan relaksasi lagi, ini untuk suatu hal yang buruk.

Nikel, saya melihat nikel ini kita masih berkutat pada teknologi ya Kairo Metalurgi yang sifatnya produknya setengah jadi ya *kan*, Nikel Pig Iron dan feronikel yang kurang lebih kadar nikelnya 4% sampai 8%. Pirolit kita yang kadar nikelnya 1,5% diolah sedikit 4% jadi NPI di ekspor dan ekspornya tidak kena pajak ekspor.

Inikan luar biasa menurut saya, industri yang seperti ini harusnya udah ditutup, kita geser ke yang lebih mampu mengelola nikel lebih baik lagi ke arah nikel matte, stainless steel dan berbagai turunannya. Sehingga nilai tambah dan *multiplier* efeknya menjadi tinggi.

Jadi kata kunci saya, kita harus menggeser terminologi *hillirisasi* mineral menjadi industrialisasi.

Yang terakhir Pak Menteri, terus terang saya pribadi atau teman-teman yang lain juga mengalami atau tidak, atau merasakan atau tidak. Ada tambahan untuk kendaraan listrik, kita *nggak* tahu itu 2023. Biasanya *kan* tambahan dibahas di sini biasanya ya, yang saya paham dari dulu namanya anggaran tambahan *tuh* dibahas di DPR.

Saya *nggak* tahu terkait tambahan kendaraan listrik ini, subsidi kendaraan listrik saya *nggak* ikut membahasnya dan tidak tahu. Terus terang saya terkait subsidi kendaraan listrik apalagi roda empat, kami PKS tidak setuju.

Kalau yang roda dua kami timbang-timbang dan betul-betul harus tepat sararan, kalau untuk orang yang tidak mampu atau industri kecil, industri menengah, industri mikro masih *lah* memungkinkan karena bagi kami yang namanya uang negara itu sangat apa *scarcity*, langka, terbatas, harus betul-betul tepat sasaran.

Nah ini kami ingin meminta penjelasan nanti, bagaimana *kok* tiba-tiba muncul. Apakah saya yang tidak tahu atau memang tiba-tiba muncul saja sebagai tambahan.

Demikian Pimpinan, terkait 2024 sesuai kesepakatan kami akan membahasnya nanti setelah acara ini.

Demikian, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mul.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan izin, 1 detik saja, *eh* jangan 10 detik.

Izin sebentar saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Mulyanto bahwa *hillirisasi* memang sangat perlu untuk peningkatan pendapatan negara. Kalau saya hanya ingin berterima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran atas program-program kerja tahun 2023 yang sudah, untuk masyarakat

ya khususnya yang sudah berjalan dengan baik, hingga mudah-mudahan bisa terealisasi selesai sebelum tahun 2024 berakhir, mengingat ini tahun politik.

Mungkin itu saja Pimpinan sebagai apresiasi, apresiasi dari kami dan kebetulan saya hari ini pakai baju kuning.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rico.

Untuk pendalaman nanti memang kita akan, nanti ada di pendalaman untuk 2023 dan 2024 juga ada nanti di dalam pendalaman, tapi mungkin Pak Menteri izin ini kalau kepuasan teman-teman tadi kalau boleh dijawab sedikit saja Pak Menteri silakan Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Oke, baik Pak Mulyanto saya juga sangat sepaham, saya juga paham dan sepakat bahwa sebetulnya narasi yang harus kita kembangkan bukan lagi *hillirisasi* tapi industrilisasi. Saya ingin menyampaikan juga bahwa dalam berbagai macam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, khususnya, khususnya investasi di bidang *critical mineral* yang kemudian nanti diolah di *smelter* dan juga turunan yang lainnya. Itu kami Kemenperin sangat terlibat, dari kami juga terlibat.

Walaupun tadi Pak Mulyanto menginginkan Kemenperin itu yang berdiri di depan, tapi memang karena semua ini diatur dan dikoordinasi oleh kantor Kemenko, maka, maka dirjennya ada di sana, tapi, tapi kami bisa kami pastikan di depan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII bahwa kami sangat terlibat dalam, bukan hanya *day to day*-nya tapi juga dalam merancang atau mempersiapkan segala macam regulasi untuk apa, untuk program yang disebut *hillirisasi*, tapi Pak Mulyanto menginginkan industrialisasi. Itu saya sangat sepakat dan mulai sekarang kita, dari kantor kami lebih senang kalau memang terminologi ini diubah tidak lagi *hillirisasi* tapi industrialisasi.

Kemudian berkaitan dengan EV Pak, ini bukan subsidi, ini bantuan pemerintah, bantuan pemerintah dan tujuannya sebetulnya ada 2, yang pertama memang ini *nggak, nggak* bisa instan, membutuhkan waktu ya, sosialisasi dan lain sebagainya karena di saya sebetulnya *nggak* terlalu senang untuk membanding-bandingkan dengan negara lain, apalagi negara yang sudah lebih maju tapi faktanya di negara-negara yang sudah lebih maju pun pertumbuhan dari penggunaan EV itu kepesatannya *nggak* sesuai dengan harapan mereka, termasuk di Indonesia.

Jadi, jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah merubah *mindset,* merubah *mindset* ya dari dari yang sekarang masih menggunakan fosil, itu kita harus merubah *mindset*-nya, budaya berpikirnya dulu, *it's takes time* untuk sampai pada masyarakat di semua lapisan, atas saja

belum sampai mungkin ya atau belum memahami, belum mengerti atau belum *fully* mendukung dan itu ini *culture* Pak sebetulnya. Ini budaya yang kita harus, harus sedikit demi sedikit harus sampai bahwa *end* kita, target utama kita mengurangi emisi, dekarbonisasi melalui *electric vehicle*.

Kemudian yang kedua, program bantuan pemerintah untuk belanja atau pembelian kendaraan listrik roda 2 dan roda 4, itu juga untuk, ini *key word*-nya Pak Mulyanto untuk mempercepat pengembangan atau pembangunan ekosistem EV.

Jadi bahasanya adalah ekosistem ya, jadi *the whole process* yang ada di EV itu sebuah ekosistem yang utuh yang mau kita percepat. Itulah kemudian pemerintah memutuskan ketika itu untuk mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan bantuan pemerintah untuk pembelian EV, baik roda 4 maupun roda 2. Dan untuk roda 2 seperti yang tadi disampaikan oleh apa-apa yang diharapkan oleh Pak Mulyanto.

Saya kira itu suatu regulasi memang yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Dimana calon penerima manfaat dari program tersebut itu kita buat sedemikian *rigid*-nya, sedemikian *complicated*-nya sehingga bantuan pemerintah untuk belanja motor listrik itu bisa untuk benar-benar masyarakat yang memang kita anggap wajar untuk mendapat bantuan Pak, wajar untuk mendapat bantuan, bahwa bantuan pemerintah karena ini menyangkut *tax payers* uangnya masyarakat, jadi kita harus betul-betul juga memastikan bahwa bukan orang kaya, bukan orang menengah yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk belanja motor listrik.

Terima kasih Pak Rio, saya kira kerjasama antara kantor kami di sini dengan Komisi VII *insha*a Allah ya sudah berjalan dengan baik dan kami siap untuk lebih baik lagi ya kerjasama antara kedua institusi kita.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, belum terjawab Pak mengenai pembahasan anggaran tambahan ini, apakah sudah dilakukan di Komisi VII atau belum Pak?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Itu dana anggarannya dari BA BUN Pak, BA BUN anggarannya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Tadi ditutup mati, saya juga *nggak* begitu jelas, Pimpinan mungkin bisa memahami. Saya terus terang *nggak* bisa memahami.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Kalau sudah selesai saya akan datangi Pak Mul untuk saya jelaskan karena kalau terbuka gini saya harus hati-hati Pak.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan, mungkin itu nanti aja Pak Mul di pembahasan berikut ini yang setelah jam 11.00 WIB ini, ini *kan* penyambutan *eh* apa penyampaian RKAKL, pengantar aja.

Terima kasih Pimpinan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, yang jelas kita setujui Pimpinan, yang jelas itu.

KETUA RAPAT:

Jauh-jauh dari Jogja Pak gandung datang ini.

Oke, kita masuk kesimpulan ya, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia:

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Perindustrian Republik Indonesia terkait pagu indikatif Kementerian Perindustrian RI di dalam RKAKL Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.760.972.328.000,-.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

2. Komisi VII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Perindustrian Republik Indonesia terkait usulan tambahan pagu indikatif Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di dalam RKAKL Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.025.600.000.000,- dan akan mendalami dengan seluruh Eselon 1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pembahasan agenda rapat kerja kita pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat, kami persilakan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Dony, Pak Eddy, Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Terima kasih sekali lagi dan kami, saya bahwa nanti setelah ini para pejabat Eselon 1 akan melanjutkan dan melakukan pembahasan lebih dalam pendalaman dengan Anggota Komisi VII. Sehingga apa-apa yang kami usulkan itu betul-betul bisa dimengerti dan baik itu filosofi maupun nanti implementasinya di lapangan pada tahun 2024.

Jadi kita mengusulkan, kami sudah memberikan arahan kepada seluruh Eselon 1 agar dalam mengusulkan program tambahan atau usulan tambahan anggaran itu harus dasarnya betul-betul kuat, rasional dan proporsional.

Jadi saya percaya nanti para dirjen kami di sini akan melanjutkannya dan kami siap arahan berikutnya apabila kami membutuhkan untuk kembali ke ruangan ini pada hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *hamdalah* rapat pada hari ini saya tutup.

Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.04 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002